



Pertarungan Gagasan Dan Kekuasaan Dalam Pemekaran Wilayah :

Studi Kasus: Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Propinsi Jambi

Aulia Farida¹, Arya Hadi Dharmawan², dan Fredian Tonny³

ABSTRAK

Pemekaran Wilayah menjadi semakin marak di Indonesia, dan dikarenakan beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Tujuan ideal dari suatu pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga ditujukan untuk memperpendek, mengefektifkan birokrasi, sehingga penggunaan, pengoilahan dapat langsung diawasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat local, sehingga menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengontrolnya. Namun demikian, fakta dilapangan menunjukkan adanya penyalahgunaan oleh sekelompok pihak untuk mencapai tujuan dan kepentingan golongan. Salah satunya adalah untuk memperoleh kekuasaan di wilayah baru. Ada banyak aktor yang terlibat di dalam pemekaran, dan masing-masing dari mereka memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri.

Salah satu wilayah yang mengalami pemekaran adalah kabupaten Bungo an Kabupaten Tebo di propinsi Jambi. Pemekaran di wilayah ini pada awalnya memang diberikan kesempatan oleh pusat, dengan adanya kesempatan tersebut, pemerintah daerah Bungo-Tebo, sangat mendukung dilakukan pemekaran dan menjadikan isu 'kepentingan masyarakat' sebagai alasan dilakukan pemekaran tersebut. Untuk memenuhi persyaratan dan mempersiapkan perencanaan pemekaran, pemerintah daerah bekerja sama dengan banyak aktor. Namun, dikarenakan ketidaksiapan perencanaan tersebut, ada banyak persyaratan pemekaran yang belum mampu dipenuhi daerah sehingga muncul rekayasa-rekayasa agar pemekaran dapat dilakukan. Akibat ketidaksiapan ini, ketika pemekaran terjadi tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tidak tercapai.

Berdasarkan latar belakang pemekaran seperti itu, menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun, pemekaran tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat, ketidakpuasan terhadap pemekaran, terjadi konflik kepentingan di masyarakat, dan pemekaran lebih sebagai perebutan kekuasaan di wilayah baru. Dengan demikian, patut dipertimbangkan jika pemekaran wilayah tidak dilanjutkan.

Katakunci : Pemekaran Wilayah, Kekuasaan, Pemerintah

¹ Mahasiswa Sosiologi Pedesaan Program Pascasarjana IPB 2007

² Komisi Pembimbing Pertama

³ Komisi Pembimbing Kedua

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Setelah berjalan lebih dari lima tahun, banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak. Meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya. Di dalam perkembangannya, daerah-daerah yang merupakan hasil pemekaran wilayah tidak selamanya mengalami perkembangan yang baik. Ketika berhadapan dengan pemekaran wilayah, fakta yang di dapat bahwa pembangunan yang ada tidak seluruhnya berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Hanya sebagian kecil pemekaran bisa dikatakan berhasil. Banyaknya kegagalan dan kekurangan di dalam wilayah-wilayah pemekaran, menimbulkan pertanyaan **“Apakah pemekaran wilayah sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?”**. Pemekaran wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada awalnya Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana birokrasi yang ada menjadi lebih pendek dan sederhana, dan semua sumber daya lokal dapat dinikmati dan dikelola langsung bagi dan oleh masyarakatnya, dan pengawasan terhadap masyarakatnya juga menjadi lebih mudah. Investasi yang masuk juga bisa langsung ke daerah. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pemekaran yang telah terjadi di Indonesia memiliki tujuan lain, yang sangat jauh dari tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Ada alasan lain yang menyebabkan pemekaran wilayah terjadi, yaitu adanya akuisi kekuasaan dari beberapa elit yang ingin memiliki kekuasaan baru. Fenomena pemekaran wilayah ini pada akhirnya menampilkan kepentingan sekelompok elit. Ide dan kepentingan elite politik dan pemerintahan ini kemudian yang memberikan warna dan pengaruh untuk melakukan perencanaan politik dalam merancang pemerintahan wilayah baru. Alasan ini yang menyebabkan pemekaran daerah dikatakan gagal untuk menjadikan masyarakat menjadi sejahtera. Pemekaran wilayah yang tidak memperhatikan kesiapan masyarakat, yang hanya berdasarkan kepentingan sekelompok elit semata menyebabkan keberhasilan pemekaran diragukan, dan pemerintah pusat menjadi kewalahan, karena biaya pemekaran tersebut. Jika pemekaran wilayah dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan elit seperti yang dijelaskan di atas, maka tujuan yang semula untuk menjadikan masyarakat lebih baik tidak tercapai.

Dengan demikian, pemekaran wilayah tidak akan memberikan dampak positif bagi pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan, yang selama ini selalu terabaikan. Salah satu daerah lain yang turut mengalami pemekaran adalah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi dipilih menjadi daerah penelitian di dalam tulisan ini, adalah karena dari beberapa data yang diperoleh bahwa, hasil yang diperoleh dari pemekaran wilayah tersebut beragam. Beberapa daerah mengalami perkembangan yang baik, dan beberapa lainnya mengalami perkembangan yang buruk. Selain itu, ada beberapa kabupaten yang sebenarnya jika dilihat dari sumber daya alam yang dimiliki diperkirakan akan maju ketika pemekaran wilayah dilakukan, namun pada kenyataannya kabupaten tersebut mengalami kemunduran

dan kemandegan. Untuk Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, yang dipilih menjadi tempat penelitian juga memiliki kondisi yang hampir sama, dimana salah satu dari kabupaten tersebut mengalami kemandegan di dalam perkembangannya. Hal ini, mungkin saja bahwa sebenarnya kedua kabupaten ini tidak semestinya dimekarkan atau belum saatnya untuk dimekarkan. Pemilihan Kabupaten Bungo-Tebo sebagai lokasi penelitian ditetapkan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah kemandegan yang dialami salah satu kabupaten hasil pemekaran. Selain itu juga karena pemekaran di kabupaten ini bisa dikatakan sebagai suatu pemekaran yang digagas oleh pemerintah. Dikatakan demikian karena, kabupaten ini dimekarkan pada tahun 1999, dan ketika itu pemerintah memang memberikan kesempatan bagi seluruh daerah di Indonesia untuk memekarkan wilayahnya. Dengan demikian diduga bahwa, pemekaran di kabupaten tersebut bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Permasalahan di dalam pemekaran wilayah dilihat dari dua kepentingan yang menjadi tujuan pemekaran. Yang Pertama adalah pemekaran wilayah yang merupakan kepentingan dari sekumpulan elit yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan tertentu. Di dalam kepentingan ini, peranan elit politik lokal dan elit lainnya sangat berperan, dimana ada etika elitisme-politik yang bermain di dalamnya. Kepentingan yang Kedua adalah yang terkait dengan pelayanan publik dimana etika populisme berperan di dalamnya. Kepentingan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Apabila selama ini pemekaran wilayah antara Kabupaten Bungo dan Tebo dikatakan belum menunjukkan pencapaian ideal dari suatu pemekaran, maka kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan belum berhasil. Tarik menarik dua kepentingan menimbulkan pertanyaan di dalam penelitian yaitu, bagaimana bentuk pertarungan gagasan antara aktor yang terlibat di dalam pemekaran Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo? Oleh karena itu penelitian ini juga melihat siapa saja aktor yang terlibat di dalam pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo serta bagaimana manuver mereka di dalam memenangkan gagasan-gagasan tersebut?

Elit dan pemerintah adalah salah satu aktor yang menjadi sumber struktural yang mampu melakukan perubahan di masyarakat. Penjelasan tersebut dapat di jelaskan oleh teori perubahan sosial Sumber-sumber struktural (dalam Lauer, 2003), dimana elit sebagai salah satu sumber struktural yang mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Di dalam teori ini, elit memiliki peranan yang besar hampir di seluruh kegiatan masyarakat. Selain elit, sumber-sumber struktural lain yang berperan penting di dalam perubahan sosial di dalam masyarakat terkait dengan pemekaran wilayah adalah pemerintah. Antara elit dan pemerintah pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan. Sama seperti elit, pemerintah memiliki peranan yang besar di dalam masyarakat. Selain teori tentang sumber-sumber struktural yang menjelaskan tentang pemekaran wilayah yang pada akhirnya membawa perubahan sosial di masyarakat, ada satu teori lagi yaitu kelompok strategis. Perubahan-perubahan yang ada di masyarakat disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok strategis di masyarakat, dan pada akhirnya juga akan membawa perubahan kembali bagi kelompok-kelompok strategis yang sudah ada. Kelompok strategis disini adalah golongan atau elit yang memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Analisa kelompok strategis ini bisa dijelaskan oleh konsep kelompok strategis Evers. Di dalam Evers (1990), kelompok strategis terdiri dari individu yang terikat oleh suatu kepentingan dan tujuan, yaitu untuk melindungi atau memperluas hasil pengambilalihan bersama.

Dengan adanya kepentingan masing-masing dari kelompok strategis ini, maka akan menimbulkan pertentangan dan konflik diantara kelompok-kelompok strategis yang saling mempertahankan dan memantapkan posisi mereka.

Tidak hanya satu elit atau golongan yang terlibat di dalam pemekaran wilayah, tetapi ada banyak elit yang terkait. Setiap elit yang memiliki peranan di dalam pemekaran wilayah memiliki gagasan-gagasan, kepentingan, ideologi dan tujuan tersendiri di dalam pemekaran wilayah tersebut. Beragam cara di lakukan oleh setiap elit yang terlibat untuk membuat gagasan mereka tercapai. Di dalam penelitian ini di duga ada beberapa elit yang terlibat di dalam masyarakat, yaitu elit pemerintahan baik itu pada tingkat daerah atau pada tingkat negara (*state*), elit civil society (masyarakat), atau elit cendekiawan. Dari setiap elit yang ada pada akhirnya akan ada yang dikalahkan dan ada yang menang, tergantung dari gagasan siapa yang berhasil tercapai. Terkait dengan teori yang dijelaskan di atas, ada satu teori yang menjelaskan adanya pengetahuan yang dominan di dalam masyarakat, yang erat kaitannya dengan kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya sehingga pada akhirnya, pengetahuan atau gagasan dari kelompok yang dominan tersebut menghegemoni kelompok lainnya yang dijelaskan oleh Gramsci (Sugiono, 1999). Hegemoni sendiri merupakan suatu formasi dari gabungan suatu grup sosial yang memiliki dominasi terhadap kelompok lainnya.. Kelompok yang berhasil menghegemonikan kelompok lain secara tidak langsung akan memiliki kekuasaan yang besar pula.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, ada dua kabupaten yang akan dilihat sebagai tempat penelitian, yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Kedua kabupaten ini sebelum pemekaran terjadi merupakan satu kabupaten, yaitu Kabupaten Bungo-Tebo. Di dalam penelitian ini, dimulai dengan tahap pre-survei, dimana dipilih beberapa desa, terutama desa yang berada diperbatasan. Setelah pre-survei dilakukan, menunjukkan hasil, bahwa desa-desa yang berada di sekitar perbatasan dan dekat dengan pusat pemerintahan lebih menunjukkan perubahan-perubahan selama sepuluh tahun pemekaran. Oleh karena itu, setelah pre-survei dilakukan, ditetapkan dua desa, yaitu desa Sungai Alai (desa yang dekat dengan pusat pemerintahan dan perbatasan dengan Kabupaten Bungo) dan desa Teluk Rendah yang berada jauh dari pusat pemerintahan, sebagai desa pilihan penelitian, untuk dilakukan pengamatan yang lebih mendalam. Setelah pre-survei dilakukan, menunjukkan hasil, bahwa desa-desa yang berada di sekitar perbatasan dan dekat dengan pusat pemerintahan lebih menunjukkan perubahan-perubahan selama sepuluh tahun pemekaran. Oleh karena itu, setelah pre-survei dilakukan, ditetapkan dua desa, yaitu desa Sungai Alai (desa yang dekat dengan pusat pemerintahan dan perbatasan dengan Kabupaten Bungo) dan desa Teluk Rendah yang berada jauh dari pusat pemerintahan, sebagai desa pilihan penelitian, untuk dilakukan pengamatan yang lebih mendalam. Di dalam penentuan responden untuk survei, dilakukan secara *stratified random sample*. Hal ini karena, populasi yang ditentukan adalah heterogen. Kemudian dua desa yang terpilih menjadi awal penuluruhan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemekaran wilayah terjadi, siapa saja yang terlibat, dan isu yang berkembang untuk mewujudkan terjadinya pemkaran tersebut. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mencari jawaban tentang tiga pertanyaan

penelitian, yang terkait dengan, peta gagasan para elit sebelum pemekaran terjadi, manuver dan cara-cara elit di dalam memenangkan gagasannya, dan pola pembingkaiannya yang dilakukan oleh para elit tersebut terkait dengan pemekaran wilayah. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami sejarah pemekaran wilayah terjadi, baik itu pihak-pihak yang setuju atau yang tidak setuju terhadap pemekaran wilayah. Penentuan narasumber untuk pendekatan kualitatif, dilakukan secara *snowballing*, yang dimulai informan yang ada di desa terpilih, kemudian berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bungo-Tebo Sebelum dan Sesudah Pemekaran

Kabupaten Bungo-Tebo adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jambi yang mengalami pemekaran pada tahun 1999. Sebelum dimekarkan menjadi dua kabupaten, ibukota kabupaten ini adalah Muara Bungo, yang berada di wilayah Kabupaten Bungo (setelah dilakukan pemekaran). Hal ini menjadikan Kabupaten Bungo menjadi kabupaten induk setelah pemekaran dilakukan. Ada banyak persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dan masyarakat agar pemekaran bisa dilakukan. Di awal persiapan pemekaran kabupaten ini, pemerintah banyak melakukan beberapa rekayasa. Hal ini, karena banyak sekali persyaratan yang diminta oleh pusat belum mampu dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo-Tebo. Namun, melihat kesempatan yang telah diberikan pusat, pemerintah daerah tidak ingin menyia-nyiakan hal tersebut. Pemerintah mengharapkan jika pemekaran dilakukan maka akan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat keseluruhan. Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pemekaran, dapat dilihat setelah sepuluh tahun pemekaran dilakukan. Namun demikian, untuk melihat perubahan tersebut, kondisi kabupaten sebelum pemekaran dilakukan juga menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, ketika tahun 1999, pemerintah pusat menjadikan kondisi daerah sebelum pemekaran menjadi penilaian penting untuk menerima dan menyetujui usulan pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo. Kondisi tersebut bisa dilihat dari ukuran-ukuran pertumbuhan daerah, baik itu dari hal kependudukan, perekonomian, sosial, kesehatan dan masih banyak lagi.

Dari beberapa data sekunder tentang kondisi Kabupaten Bungo-Tebo sebelum dan sesudah pemekaran dilakukan didapat bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi selama sepuluh tahun pemekaran dilaksanakan. Jika dilihat dari jumlah penduduk, sebelum pemekaran jumlah penduduk di Kabupaten Bungo-Tebo jauh lebih banyak dibanding setelah kabupaten tersebut dipisahkan. Hal ini karena jumlah penduduk sebelum pemekaran dibagi menjadi dua setelah pemekaran dilakukan. Namun setelah sepuluh tahun pemekaran dilakukan, pertumbuhan penduduk di dua kabupaten tidaklah terlalu besar. Begitu juga dengan tingkat kepadatan penduduk di kedua Kabupaten setelah pemekaran dan sebelum pemekaran, hanya meningkat enam persen dari awal pemekaran hingga sekarang. Tingkat kepadatan penduduk, tidak menunjukkan bahwa, sebaran penduduk merata disetiap wilayah kabupaten yang dimekarkan. Pusat-pusat keramaian dimana jumlah penduduk terbesar, masih sama seperti kondisi sebelum pemekaran dilakukan, yaitu hanya terpusat di wilayah-wilayah yang sebelumnya telah ramai ketika pemekaran belum dilakukan. Kondisi

ketidakmerataan kepadatan penduduk ini terulang kembali setelah sepuluh tahun pemekaran.

Keramaian yang hanya terdapat dititik-titik tertentu saja di Kabupaten Tebo, menunjukkan bahwa, pertumbuhan di kabupaten ini, tidak merata. Hal ini juga bisa dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun terdapat peningkatan PAD yang besar di Kabupaten Tebo, namun sumber pendapatan tersebut lebih banyak berasal dari satu wilayah saja, yaitu wilayah Rimbo Bujang beserta daerah pemekarannya. Sedangkan untuk daerah yang lain tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelum pemekaran dilakukan. Pendapatan daerah yang meningkat tidak otomatis menyebabkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, adanya peningkatan pendapatan juga menyebabkan belanja untuk keperluan pegawai pemerintahan, dan keperluan pemerintah lainnya juga semakin besar. Dari data sekunder yang didapat, di Kabupaten Bungo, jumlah belanja daerah untuk keperluan pegawai pemerintahan dan keperluan pemerintah meningkat di awal-awal pemekaran dan mengalami penurunan hingga sekarang. Di awal pemekaran, jumlah pengeluaran daerah untuk kepentingan pemerintahan mencapai 46 % dari seluruh pengeluaran yang ada, dan mengalami penurunan hingga penelitian dilakukan, yaitu 37 % dari seluruh pengeluaran daerah. Sedangkan untuk Kabupaten Tebo, jumlah pengeluaran untuk kebutuhan pemerintahan dan pegawainya terus meningkat hingga sekarang. Di awal pemekaran, pengeluaran daerah untuk kebutuhan pemerintahan mencapai 65 % dari seluruh pengeluaran daerah, dan terus meningkat hingga penelitian dilakukan yaitu 68% dari seluruh pemekaran. Kondisi ini menunjukkan, bahwa pemekaran tidak lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi lebih untuk kepentingan sekelompok orang. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah bukan untuk kepentingan dan pembangunan bagi masyarakat. Tetapi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan kebutuhan para pegawainya.

Perubahan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, belum mampu diwujudkan setelah sepuluh tahun pemekaran dilakukan. Data sekunder yang didapat menunjukkan, bahwa tingkat pengangguran di dua kabupaten setelah pemekaran dilakukan terus bertambah. Di Kabupaten Bungo, di awal pemekaran, jumlah pengangguran meningkat 23 % dari sebelum pemekaran dilakukan, dan hingga penelitian dilakukan, pengangguran terus meningkat hingga 35 %. Sedangkan bagi Kabupaten Tebo, jumlah pengangguran, meningkat jauh lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Bungo. Dari awal pemekaran hingga penelitian dilakukan, jumlah pengangguran meningkat hingga 89%. Hal ini menunjukkan, bahwa pemekaran tidak mampu memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Tebo. Walaupun jumlah investasi yang masuk ke kabupaten tersebut meningkat, tidak menjamin mampu memberikan kesempatan bekerja yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga bisa dilihat dari penggolongan masyarakat ke dalam keluarga sejahtera. Selain itu juga ditunjukkan, bahwa jumlah masyarakat yang tergolong ke dalam keluarga pra-sejahtera menurun sebesar 11, 5 % bagi Kabupaten Bungo, sedangkan untuk Kabupaten Tebo menurun sebesar 0,9 %. Jumlah ini masih sangat kecil untuk waktu sepuluh tahun setelah pemekaran dilakukan. Selain itu, selama sepuluh tahun pemekaran dilakukan, sebagai kepala keluarga di dua kabupaten, sebagian besar merupakan keluarga sejahtera golongan II (KS II). Dari awal pemekaran hingga sekarang, tidak ada peningkatan di

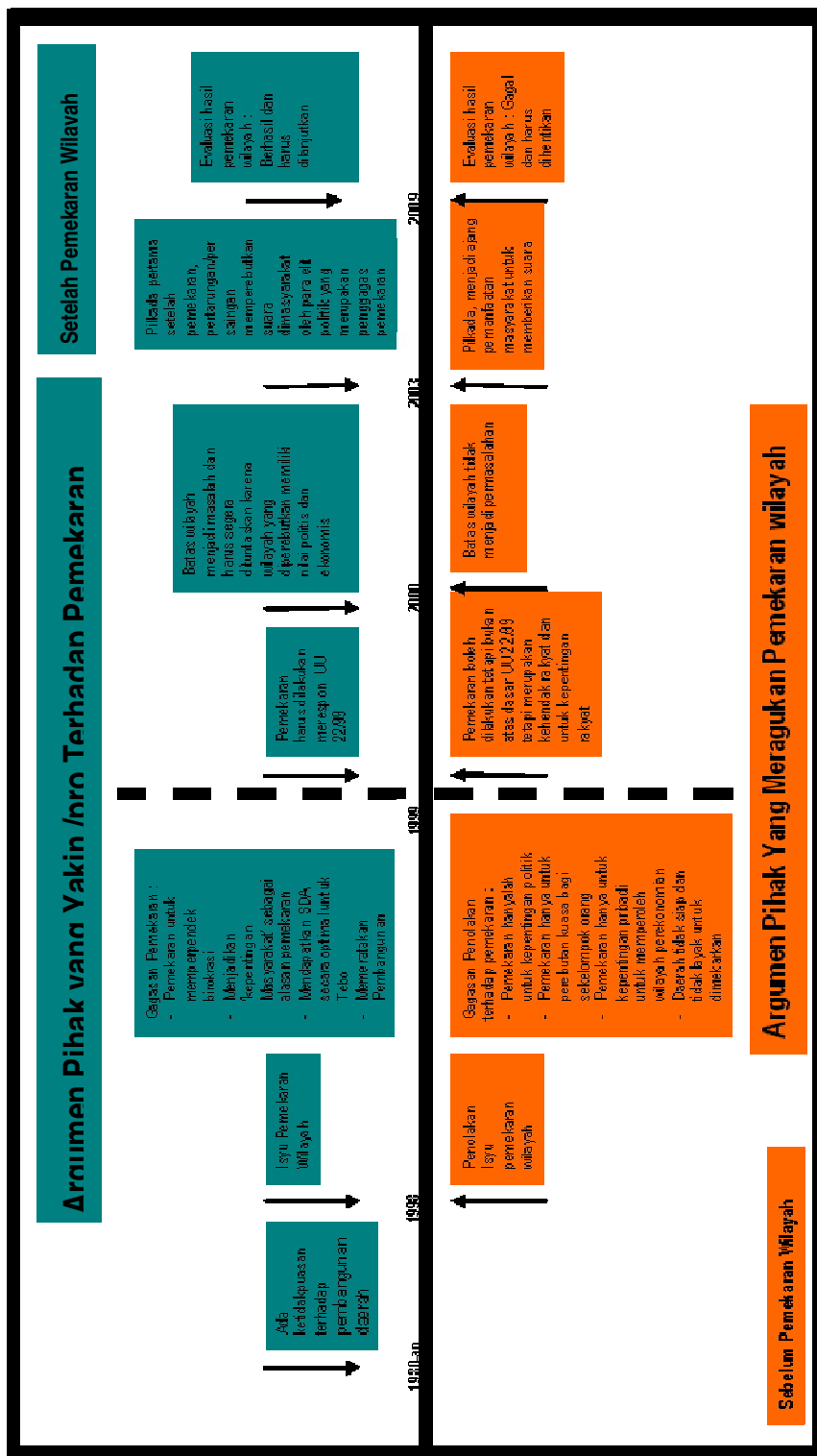
masyarakat, dan sebagian besar dari mereka tetap berada di golongan ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa, perubahan untuk mensejahterakan masyarakat belum berhasil dilakukan.

Fasilitas umum bagi masyarakat juga bisa menjadi indikator kesejahteraan bagi masyarakat. Di Kabupaten Bungo dan Tebo, perubahan setelah pemekaran dilakukan, tidak banyak menunjukkan peningkatan. Bagi Kabupaten Bungo yang merupakan kabupaten induk, fasilitas penggunaan listrik dari PLN, mengalami peningkatan, dan hingga penelitian dilakukan, hampir 76 % dari masyarakat sudah menggunakan fasilitas PLN. Sedangkan untuk Kabupaten Tebo, kondisi ini tidak mengalami banyak perubahan dari awal pemekaran hingga penelitian dilakukan. Di awal pemekaran, jumlah masyarakat yang menggunakan fasilitas PLN adalah 24, 8 %, dan ketika penelitian dilakukan, penggunaan PLN hanya 24, 4 %. Data ini menunjukkan, bahwa fasilitas umum seperti listrik tidak banyak berubah di Kabupaten Tebo. Informasi yang diperoleh dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pemekaran tidak membawa kesejahteraan dan perbaikan bagi masyarakat, dan yang merasakan manfaat pemekaran hanyalah segelintir orang, terutama mereka yang berada di pemerintahan, dan bekerja di pemerintahan. Sedangkan bagi masyarakat secara keseluruhan, perubahan tersebut tidak banyak dirasakan.

Identifikasi Sejarah Pemekaran Wilayah

Pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Bungo Tebo resmi telah dimekarkan menjadi dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Kronologi pemekaran wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo dijelaskan di dalam gambar 1, yang menggambarkan secara singkat bagaimana pemekaran terjadi di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

Sebelum pemekaran dilakukan, gejala ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan sudah ada. Pembangunan yang hanya terpusat di ibukota kabupaten menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat. Kondisi ini pada awalnya, mulai dijadikan oleh sekelompok aktor yaitu, elit birokrasi dan elit politik yang berasal dari Tebo untuk melakukan pemekaran di kabupaten ini. Kemudian pada akhir 1998 dan awal 1999, kesempatan pemekaran diberikan oleh pemerintah pusat, yang disambut baik oleh pemerintah daerah. Maka pemekaran dilakukan. Namun demikian, tidak semua aktor yang terlibat di dalam pemekaran, yakin terhadap kebijakan pemekaran yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Terdapat pertentangan gagasan antara aktor yang mendukung penuh kebijakan pemekaran dan aktor yang meragukan kebijakan pemekaran. Seperti yang digambarkan di dalam gambar 1 tersebut. Hal ini karena tidak siapnya daerah untuk dimekarkan ketika itu. Pembahasan mengenai pertarungan gagasan antara tiap aktor yang terlibat di dalam pemekaran akan dijelaskan lebih lanjut di dalam bab enam. Selain itu, setelah setahun berjalan, konflik perbatasan terjadi di wilayah ini. Kondisi menunjukkan bahwa, pemekaran perlu dievaluasi kembali, apakah benar-benar perlu dilanjutkan atau dihentikan. Penjelasan tentang sejarah pemekaran akan dijelaskan lebih lanjut dibawah dimana selain alasan untuk memperpendek birokrasi dan kesempatan dari pusat, terdapat beberapa alasan dilakukannya pemekaran.



Gambar 1. Kronologi Penekaran Wilayah di Kabupaten Bungo-Tobo 2009

Argumentasi Pemekaran Wilayah

Ada banyak gagasan dan ide yang bermain di dalam mewujudkan pemekaran tersebut. Banyak aktor yang terlibat di dalamnya, dan setiap aktor memiliki ide dan kepentingan masing-masing di dalam pemekaran. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah merupakan kesempatan dan salah satu alasan dilakukannya pemekaran. Ketika kesempatan pemekaran tersebut diberikan, pemerintah menjadikan 'kepentingan masyarakat' sebagai alasan untuk menerima kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut. Namun demikian, ada banyak alasan lain sehingga pemekaran tetap dilakukan oleh pemerintah, walaupun pada masa itu, kondisi daerah belum siap untuk dimekarkan. Salah satu alasan penting yang melatarbelakangi pemekaran adalah alasan ekonomi. Sebelumnya telah dijelaskan, jika sebelum pemekaran dilakukan, perhatian pemerintah lebih diutamakan kepada wilayah yang sekarang masuk ke bagian Kabupaten Bungo. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu dilakukannya pemekaran di Kabupaten ini. Dengan dilakukannya pemekaran, masyarakat mengharapkan, pembangunan tidak hanya terfokus di wilayah Muara Bungo dan sekitarnya saja, tetapi merata keseluruh wilayah di kabupaten.

Alasan ketidakmerataan perekonomian menjadi salah satu pemicu dilakukannya pemekaran. Masyarakat dan tokoh masyarakat yang berasal dari Kabupaten Tebo, ketika kesempatan pemekaran dilakukan, menyambut baik hal tersebut. Karena berharap pemekaran mampu membawa pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat. Kondisi pembangunan Kabupaten Bungo-Tebo yang tidak merata ketika itu dijadikan sebagai kesempatan oleh pihak-pihak tertentu seperti elit birokrasi, elit politik dan mantan-mantan pejabat daerah untuk memekarkan Kabupaten Bungo-Tebo. Alasan untuk pemerataan pembangunan ini dipakai oleh aktor-aktor yang mendukung pemekaran untuk memisahkan Kabupaten Bungo-Tebo menjadi dua kabupaten. Aktor-aktor yang mendukung penuh pemekaran juga memiliki argumen, jika pemekaran dilakukan, maka kepentingan masyarakat Tebo dan wilayah yang jauh dari ibukota menjadi lebih diperhatikan, karena pusat pemerintahan tidak akan jauh lagi.

Selain alasan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan meratakan pembangunan, alasan lain yang memicu pemekaran adalah alasan politik. Dengan adanya kesempatan pemekaran dari pusat, banyak pihak yang menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk memperoleh posisi politik dan kekuasaan di wilayah baru. Terutama bagi mereka yang sebelumnya sudah pernah memiliki jabatan di pemerintahan Kabupaten Bungo-Tebo. Jika pemekaran dilakukan, maka hal tersebut akan memberikan kesempatan untuk memperoleh kembali kekuasaan. Kekuasaan dan politik merupakan tujuan lain dari aktor-aktor yang terlibat di dalam pemekaran wilayah. Beberapa dari pejabat dan mantan pejabat sangat setuju jika pemekaran dilaksanakan. Terutama mereka yang berasal dari Kabupaten Tebo. Mantan pejabat dari Kabupaten Tebo, sangat mendukung pemekaran, di duga karena ingin mendapatkan keuntungan politik, karena dengan adanya kabupaten baru, mereka mendapat kesempatan kembali untuk memiliki jabatan di wilayah baru. Jika bukan mereka yang menduduki jabatan, kerabat merekalah yang mendapatkan kesempatan tersebut. Selain itu, setelah pemekaran dilakukan. banyak diantara pejabat dan mantan pejabat daerah tersebut yang ikut mencalonkan diri di wilayah

pemilihan Kabupaten Tebo. Alasan-alasan seperti ini yang menjadikan aktor-aktor tersebut mendukung pemekaran Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Aktor-aktor yang mendukung dan menyetujui secara penuh dilakukannya pemekaran, sebagian besar adalah pejabat pemerintahan, mantan pejabat beserta tokoh-tokoh politik lainnya. Dimana mereka memiliki kepentingan politik dan ekonomi terhadap pemekaran, sehingga mereka sangat menyetujui dilakukannya pemekaran di Kabupaten Bungo-Tebo.

Argumentasi Penyatuan Wilayah

Aktor-aktor yang terlibat di dalam pemekaran tidak semuanya menyetujui pemekaran tersebut. Beberapa diantara aktor yang terlibat meragukan pemekaran akan membawa perubahan di dalam masyarakat. Walaupun mereka mengharapkan perubahan jika pemekaran dilakukan, namun beberapa diantaranya ragu-ragu dan tidak yakin terhadap hasil pemekaran. Keraguan-raguan dan ketidakyakinan mereka disebabkan karena tidak siapnya daerah ketika itu. Selain itu mereka juga menganggap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat kurang, sehingga banyak pihak yang tidak mengetahui dan tidak dilibatkan di dalam persiapan pemekaran. Hal ini, di kemudian hari menyebabkan ketidakpedulian terhadap keberlangsungan dan keberhasilan pemekaran tersebut.

Aktor-aktor yang meragukan keberhasilan pemekaran, sebagian besar adalah mereka yang berasal dari *grass-root*, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, ada sekelompok kecil mantan pejabat daerah yang tidak menyetujui dilakukannya pemekaran. Hal ini karena mereka menganggap pada saat itu, daerah Kabupaten Bungo-Tebo belum layak dan belum siap untuk dimekarkan. Persiapan yang kurang dari pemerintah menyebabkan pelaksanaan pemekaran dilakukan dengan tergesa-gesa. Selain itu, persiapan yang tidak matang juga menyebabkan munculnya kebijakan yang tidak membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat di dalam pemekaran juga menyebabkan pemekaran tidak banyak memberikan pengaruh bagi mereka, dan masyarakat menjadi tidak terlalu peduli terhadap pemekaran. Selain LSM dan organisasi kepemudaan, sebagian besar masyarakat merupakan aktor yang meragukan pemekaran mampu membawa perubahan bagi mereka. Selain kurang dilibatkannya masyarakat, mereka juga menganggap pemekaran hanya sebagai kesempatan bagi pemerintah, mantan pejabat dan tokoh-tokoh politik lainnya untuk mendapatkan kekuasaan di wilayah baru. Alasan-alasan seperti inilah yang menyebabkan pemekaran diragukan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena alasan-alasan ini, kebijakan yang dilakukan, lebih kepada penyatuan kabupaten.

Narasi-narasi yang Dipertentangkan di Dalam Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo

Pemekaran Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo merupakan salah satu bentuk pemekaran yang didapat dari kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ketika kesempatan tersebut diberikan kepada daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo-Tebo segera menyambut baik kesempatan tersebut. Pemekaran di Kabupaten Bungo-Tebo segera dilakukan, dengan persiapan yang sangat singkat. Di awal persiapan pemekaran, kondisi sebenarnya Kabupaten Bungo-Tebo bisa dikatakan belum siap untuk dimekarkan. Namun hal tersebut tidak diperhatikan secara

seksama oleh pemerintah, dan menjadikan "kepentingan masyarakat" sebagai alasan untuk tetap dilakukannya pemekaran tersebut. Di dalam pelaksanaan dan persiapan pemekaran, ada banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Walaupun pada akhirnya pemekaran berhasil dilakukan, dan tiap aktor memiliki harapan pemekaran mampu memberikan perubahan lebih baik, namun mereka masing-masing memiliki pendapat bagaimana pemekaran dilakukan. Pemekaran memang diharapkan mampu memberikan perubahan lebih baik bagi masyarakat di Kabupaten Bungo-Tebo. Namun demikian, diantara beberapa aktor yang terlibat di dalam pemekaran, memiliki beberapa keragu-raguan terhadap keberhasilan pemekaran, dan aktor-aktor lainnya, memiliki keyakinan yang besar atau sangat mengharapkan pemekaran dilakukan.

Keragu-raguan dan keyakinan dari tiap aktor yang terlibat di dalam pemekaran berbeda-beda, walaupun sebagian besar mengharapkan pemekaran dilakukan, dengan harapan mampu membawa perubahan di masyarakat. Dari kutipan tersebut juga dapat disimpulkan di dalam tabel berikut tentang pendapat dari masing-masing aktor terhadap pemekaran.

Tabel 1. Pendapat Tiap Aktor yang Terlibat di Dalam Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo 2009

Aktor	Ragu-ragu terhadap pemekaran	Yakin terhadap pemekaran
Pemerintah/ Pejabat		Kesempatan pemekaran tidak datang dua kali, dan harus dimanfaatkan
Elit politik		Dengan pemekaran, akan memperpendek birokrasi yang ada
Mantan pejabat	Pemekaran dilakukan jika masyarakat siap	Pemekaran merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan
Tokoh adat/agama		Pemekaran adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan
LSM	Pemekaran hanya merupakan kamufase yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat	
Tokoh Pemuda	Pemekaran harus dilakukan untuk pemeratakan pembangunan	
Elit masyarakat lokal	Pemekaran bisa dilakukan jika nantinya menjadikan pemerintah lebih memberikan perhatian	
Masyarakat	Pemekaran bisa dilakukan jika membawa perubahan baik bagi masyarakat	

Sumber : Data Primer (diolah) 2009

Tabel di atas menggambarkan bahwa tiap aktor memiliki alasan dan ide masing-masing terhadap pemekaran. Beberapa diantara aktor yang terlibat memiliki keragu-raguan terhadap keberhasilan pemekaran, dan diantaranya sangat yakin jika pemekaran mampu membawa perubahan baik bagi masyarakat. Aktor yang

memiliki keyakinan besar terhadap pemekaran adalah mereka yang berasal dari elit birokrasi, elit politik dan sebagian besar mantan pejabat daerah. Mereka inilah, yang di dalam pemekaran memiliki keterlibatan terbesar, karena didukung oleh kekuasaan yang mereka miliki. Sedangkan aktor lain seperti LSM, tokoh kepemudaan, elit lokal dan masyarakat, merupakan aktor yang memiliki keraguan terhadap keberhasilan pemekaran. Mereka juga setuju jika pemekaran dilakukan, tetapi harus mampu membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. Walaupun tiap aktor pada dasarnya setuju jika pemekaran dilakukan, namun mereka memiliki syarat-syarat masing-masing di dalam pelaksanaan pemekaran tersebut.

Pertarungan Dua Pihak, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo

Adanya beragam gagasan dan kepentingan di dalam pemekaran menyebabkan persaingan-persaingan diantara aktor-aktor yang terlibat di dalam pemekaran. Sebagian dari aktor yang terlibat di dalam pemekaran, seperti pemerintah, pejabat pemerintah, mantan pejabat dan tokoh politik lainnya adalah aktor-aktor yang sangat menyetujui pemekaran. Sedangkan aktor-aktor lain seperti LSM, organisasi pemuda dan sebagian besar masyarakat adalah aktor-aktor yang meragukan pemekaran mampu membawa perubahan dan mensejahterakan masyarakat. Namun karena aktor-aktor yang menyetujui pemekaran adalah mereka yang memiliki kekuasaan di daerah, menyebabkan persaingan antara aktor-aktor yang terlibat dimenangkan oleh mereka.

Gagasan aktor-aktor yang setuju dan mendukung pemekaran, pada akhirnya berhasil memenangkan pemekaran, dan pemekaran tersebut berhasil dilakukan. Kabupaten Bungo-Tebo dimekarkan pada tahun 1999. Ketika kabupaten ini dimekarkan, maka akan muncul kabupaten baru dengan wilayah-wilayahnya masing. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah yang ingin memekarkan wilayahnya. Salah satunya adalah masalah demografi. Dengan adanya wilayah baru, masalah batas wilayah dan penduduk merupakan hal penting untuk kelangsungan wilayah tersebut ke depannya. Untuk Kabupaten Bungo-Tebo sendiri, masalah demografi memilih sejarah tersendiri sehingga, kabupaten tersebut berhasil dimekarkan.

Ketika Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo dibentuk, penentuan batas wilayah belum menunjukkan batas-batas yang riil. Ketika berkas-berkas diajukan ke pusat untuk pertama kalinya, batas wilayah untuk kedua kabupaten baru ini, hanya berupa batas-batas umum. Ketika pengajuan tersebut ditolak, maka untuk melengkapinya ditentukanlah batas-batas wilayah, yang pada awal perencanaan hanyalah sementara. Hal ini karena tenggat waktu yang relatif singkat yang diberikan oleh pusat agar daerah bisa mengajukan pemekaran di wilayahnya. Pada awalnya pembagian wilayah untuk kedua kabupaten baru, dibagi berdasarkan wilayah kewedanaan (pemerintahan) lama, dimana di Kabupaten Bungo-Tebo terdapat dua kewedanaan, yaitu kewedanaan Bungo dan kewedanaan Tebo. Secara otomatis, kewedanaan Bungo menjadi wilayah untuk Kabupaten Bungo dan kewedanaan Tebo menjadi wilayah untuk Kabupaten Tebo. Namun demikian, batas-batas wilayah tersebut masih berupa batas-batas umum, dan batas riil wilayah masing-masing kabupaten belum ditentukan. Sedangkan pemerintah pusat meminta kelengkapan bahan-bahan yang diajukan beserta keterangan dari batas-batas wilayah baik secara garis besar ataupun secara riilnya. Karena waktu yang diberikan sangat singkat, maka pada awal perencanaan pemekaran wilayah, batas-batas wilayah ditentukan berdasarkan

kecamatan yang masuk ke dalam wilayah masing-masing kabupaten baru yang akan dibentuk.

Jika dilihat berdasarkan batas alam, batas wilayah kewedanaan Bungo dan Tebo adalah sebuah sungai, yaitu Sungai Alai, yang membagi dua Kabupaten Bungo dan Tebo. Oleh karena itu, batas tersebut kembali digunakan untuk menentukan batas bagi wilayah kabupaten yang akan dibentuk. Namun karena waktu yang diberikan untuk mempersiapkan semuanya sangat singkat, maka batas alam yang berada di dalam wilayah, tidak dapat ditentukan dengan detil. Dengan demikian, batas-batas wilayah hanya ditetukan berdasarkan kecamatan yang dibagi ke masing-masing kabupaten yang baru. Ketika persiapan pemekaran tersebut, disetujui bahwa batas tersebut berdasarkan kecamatan. Namun hal itu hanya untuk sementara, dan akan dikembalikan nantinya berdasarkan batas alam dan menurut sejarah setelah pemekaran diresmikan. Permasalahan batas wilayah yang belum terselesaikan hingga sekarang memiliki alasan masing-masing bagi kedua Kabupaten yang berseteru. Ada dua Wilayah yang menjadi permasalahan hingga sekarang, yang mana keduanya adalah wilayah transmigrasi. Kedua wilayah tersebut adalah Rimbo Bujang dan Kuamangkuning. Dalam kasus ini, Rimbo Bujang lebih menjadi rebutan oleh kedua kabupaten. Ada beberapa alasan wilayah ini dijadikan rebutan kedua belah pihak. Diantaranya adalah sebagai alasan ekonomi dan alasan politik.

Pertarungan Politik di dalam Penentuan Batas Wilayah Kabupaten

Permasalahan batas wilayah yang belum terselesaikan hingga sekarang memiliki alasan masing-masing bagi kedua Kabupaten yang berseteru. Ada dua Wilayah yang menjadi permasalahan hingga sekarang, yang mana keduanya adalah wilayah transmigrasi. Kedua wilayah tersebut adalah Rimbo Bujang dan Kuamangkuning. Dalam kasus ini, Rimbo Bujang lebih menjadi rebutan oleh kedua kabupaten. Ada beberapa alasan wilayah ini dijadikan rebutan kedua belah pihak yang berseteru. Diantaranya adalah sebagai alasan ekonomi dan alasan politik.

Dilihat dari sudut pandang politik, Rimbo Bujang adalah wilayah yang menjanjikan bagi kabupaten yang memilikinya. Setelah pemekaran Rimbo Bujang ditetapkan oleh pemerintah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tebo. Di antara semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, pertumbuhan di Rimbo Bujang adalah yang terbaik dan terpesat. Bahkan Rimbo Bujang mampu memberikan pemasukan terbesar bagi daerah. Hampir 70 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo disokong oleh Rimbo Bujang (Tebo Dalam Angka 2003). Dengan demikian tidaklah aneh jika wilayah ini sangat dipertahankan oleh Kabupaten Tebo. Selain alasan ekonomi tersebut, wilayah Rimbo Bujang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Hampir 60 persen penduduk Kabupaten Tebo berdomisili di Rimbo Bujang (Tebo Dalam Angka 2003). Rimbo Bujang menjadi penentu salah satu syarat agar Tebo bisa menjadi kabupaten, karena Rimbo Bujang memberikan sumbangan jumlah penduduk bagi kabupaten tersebut.

Jumlah penduduk yang banyak, juga menjadikan Rimbo Bujang sebagai wilayah yang diperebutkan. Hal ini terkait dengan isu politik pemilihan wakil rakyat dan pemilihan daerah. Oleh karena pemilihan yang berdasarkan mata pilih, maka Rimbo Bujang yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Tebo dipertahankan. Suara dari tiap mata pilih yang ada di wilayah inilah, yang menjadi alasan Rimbo

Bujang menjadi rebutan bagi kedua kabupaten khususnya Kabupaten Tebo. Adanya dugaan bahwa, Rimbo Bujang dimanfaatkan sebagai basis suara menjadikan masalah ini sebagai isu politik.

Isu politik lain yang berkembang di dalam pertikaian mempertahankan Rimbo Bujang adalah keinginan untuk membentuk kota atau kabupaten tersendiri. Setelah beberapa tahun pemekaran terjadi, konflik batas wilayah antara kedua kabupaten sedikit mereda, walaupun sampai sekarang masalah tersebut belum diselesaikan dengan tuntas. Masyarakat dimasing-masing kabupaten yang semula meolak penentuan batas kembali sudah bisa diajak untuk bermusyawarah. Tetapi sedikit berbeda dengan masyarakat yang berada di Rimbo Bujang sendiri. Mereka tidak setuju jika wilayah mereka dipecah, dimana sebagian masuk ke Kabupaten Bungo dan sebagian lagi masuk ke Kabupaten Tebo. Kondisi seperti ini dicurigai oleh pihak Bungo, bahwa ada indikasi Rimbo Bujang akan membentuk kota atau kabupaten sendiri. Hal ini bisa saja terjadi, karena kondisi Rimbo Bujang yang terus berkembang pada suatu waktu akan siap untuk dijadikan kota atau kabupaten baru. Agar hal tersebut dapat terwujud, maka wilayah Rimbo Bujang akan lebih baik tetap berada di satu kabupaten. Kecurigaan-kecurigaan seperti ini tidak terlepas dari muatan politik. Hal lain yang menunjukkan adanya indikasi akan dibentuknya kota atau kabupaten baru, adalah kebijakan pembangunan yang lebih berpusat ke arah Rimbo Bujang dibandingkan daerah lainnya.

Analisis Kelompok-Kelompok Strategis dan Kepentingan Mereka Di dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten Bungo-Tebo

Di dalam perencanaan pemekaran dan tahapan menuju pemekaran, pemerintah ikut melibatkan pihak-pihak lainnya, diantaranya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan, dan materi, seperti para mantan pejabat yang pernah berkuasa di Kabupaten Bungo ataupun di Provinsi Jambi. Pemerintah juga mengajak tokoh-tokoh adat dan agama yang ada di masyarakat. Namun sebagian besar dari tokoh masyarakat tersebut juga merupakan orang-orang yang dulunya memiliki kedudukan atau bekerja di pemerintahan. Di dalam pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo, setiap aktor yang terlibat di dalam pemekaran memiliki posisi, ide dan tujuan tertentu, dan membentuk kelompok-kelompok yang saling berafiliasi dengan kelompok lainnya. Posisi masing-masing aktor di dalam pemekaran juga dijelaskan di dalam tabel 2 sebagai berikut:

Hampir sama dengan gambar 2 tentang bagan posisi aktor di dalam pemekaran Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di bawah, tabel 2 kembali menjelaskan bahwa, setiap aktor memiliki posisi tertentu di dalam pemekaran. Mereka juga memiliki kepentingan dan harapan masing-masing di dalamnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling berafiliasi di dalam memenangkan kepentingan tersebut. Namun demikian, sangat jelas terlihat bahwa dari setiap aktor yang terlibat, mereka yang memiliki kekuasaanlah yang akan berhasil memenangkan gagasannya. Di dalam kasus pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo, aktor tersebut adalah pemerintah dan elit-elit yang berkuasa. Kedua aktor ini bisa dikatakan sebagai pelaku utama pemekaran, dan mampu memanfaatkan aktor lainnya untuk mendukung gagasan mereka.

Selain Tabel 2 (terdapat di dalam lampiran) yang menjelaskan tentang posisi tiap aktor di dalam pemekaran, terdapat bagan yang juga menjelaskan hal tersebut. Bagan

dibawah ini, menunjukkan sekilas peta kelompok dan posisinya di dalam pemekaran:

Tabel 2. Tabel Posisi Aktor di Dalam Isu Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo 2009

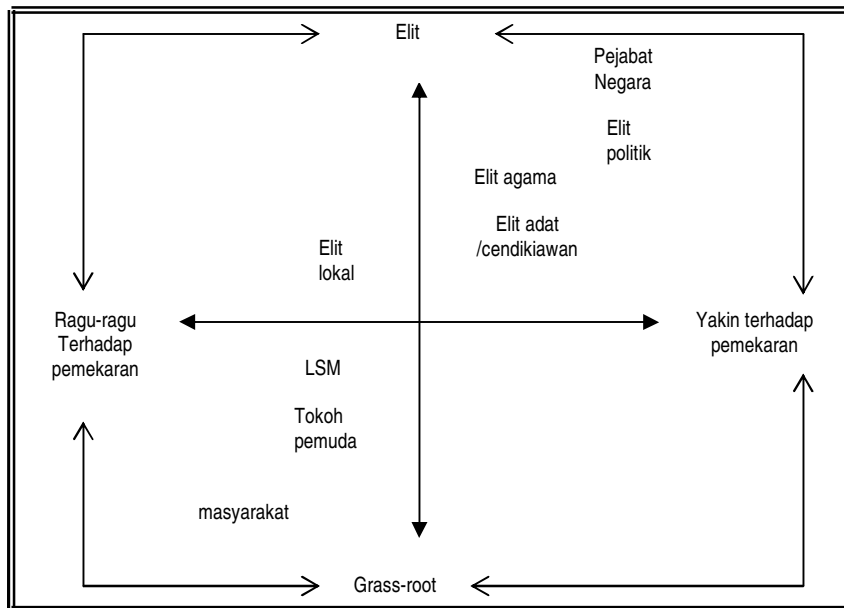
No.	Aktor	Afiliasi organisasi	Posisi terhadap pemekaran	Kepentingan yang diusung	Aliansi dengan aktor lainnya
1	Pemerintah	Pemerintahan/ politik	Setuju/pendgagas	Pelayanan publik/ pemekaran kekuasaan	Semua aktor terlibat terutama elit berkuasa
2	Elit politik	Politik partai/non partai	Setuju/pendukung penuh	Mendapatkan kekuasaan	Semua aktor terlibat terutama elit berkuasa
3	Tokoh masyarakat (mantan Pejabat daerah)	Politik/ sipil	Setuju/pendukung penuh	Distribuai kekuasaan	Semua aktor terlibat terutama elit berkuasa
4	Tokoh agama	Keagamaan	Setuju	-	Pemerintah
5	Tokoh adat	Adat	Setuju	-	pemerintah
6	LSM/organisasi pemuda	Non-pemerintah	Mendukung dan memantau	Mendapat bagian di dalam pemekaran	Pemerintah/ masyarakat
7	Elit lokal/desa	Pemerintah/ lokal	Perpanjangan tangan pemerintah	Distribusi kekuasaan	Pemerintah/ masyarakat
8	Masyarakat	Sipil	Setuju/kepas- rahan/ketidakpeduli- an/meragukan	Mendapatkan kesejahteraan	Dimanfaatkan aktor lainnya

Sumber : Data Primer (diolah) 2009

Gambar di bawah, memberikan bukti-bukti bahwa mereka yang sejutu dan yakin dengan pendekatan pemekaran sebagai strategi pembangunan daerah adalah elit politik, birokrasi, adat dan agama. Sedangkan *grass-root* pada umumnya adalah mereka yang meragukan pemekaran daerah sebagai strategi pembangunan.

Bagan di atas menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki posisi masing-masing di dalam pemekaran. Namun secara keseluruhan tiap aktor yang terlibat memiliki tingkatan keberterimaan didalam menyikapi pemekaran. Setiap aktor memiliki alasan, ide dan gagasan sendiri di dalam pelaksanaannya. Pada kasus pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo, sebagian besar tokoh-tokoh yang terlibat di dalam perencanaan pemekaran wilayah, adalah para tokoh yang secara tidak langsung mempunyai kaitan terhadap pemerintah. Seperti tokoh adat dan tokoh agama, yang sebagian besar adalah mereka yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bungo-Tebo, atau merupakan pensiunan PNS. Selain itu juga para elit politik baik dari partai maupun non-partai, dimana mereka juga memiliki hubungan erat dengan pemerintahan yang berkuasa, terutama di dalam pemerintahan legislatif. Maka secara otomatis mereka mendukung dan pro kepada pemerintah. Begitu juga dengan

tokoh masyarakat yang sebelumnya adalah mantan pejabat di kabupaten tersebut, seperti mantan bupati dan wakilnya, dan mantan anggota DPRD lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat seperti ini, biasanya adalah mereka yang memiliki kekukatan dan kekuasaan, baik itu materi, sehingga pemerintah cenderung lebih memihak kepada mereka.



Sumber : Data Primer (diolah) 2009

Gambar 2. Bagan Peta Kelompok dan Posisinya di dalam pemekaran Bungo-Tebo 2009

Aktor-aktor Yang Terlibat di Dalam Pemekaran Kabupaten Bungo- Tebo

Pemekaran wilayah dilakukan agar birokrasi dan pelayanan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut adalah tujuan ideal dari pemekaran wilayah. Namun kondisi di lapangan, tujuan utama tersebut belum tentu terwujud ataupun menjadi alasan pemekaran dilakukan. Ada banyak kepentingan dan tujuan lain yang terlibat di dalamnya. Hal ini karena tidak sedikit pihak yang memiliki andil di dalam terwujudnya suatu pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah melibatkan banyak pihak di dalam pelaksanaannya. Setiap pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Kepentingan yang ada di dalamnya bisa berupa kepentingan pribadi, golongan atau pun kepentingan yang benar-benar bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan dan gagasan dari tiap aktor yang terlibat di dalam pemekaran tersebut dapat dilihat di dalam tabel 3 berikut:

Di dalam pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo sendiri, tidak hanya satu pihak yang terlibat di dalamnya. Di akhir tahun 1998, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengajukan pemekaran di wilayah mereka

masing-masing. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini memiliki batas waktu yang cukup singkat, karena pada waktu itu, masa jabatan DPR, MPR dan Presiden sudah hampir berakhir. Melihat adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan singkatnya waktu yang diberikan, pemerintah daerah segera melakukan koordinasi di wilayahnya agar pengajuan pemekaran di wilayah mereka dapat disetujui.

Agar persiapan pemekaran wilayah dapat berlangsung dengan cepat, maka pemerintah daerah Tingkat I, langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten setelah mendapatkan informasi dari pusat. Setelah informasi tentang pemekaran tersebut sampai ke pemerintah daerah kabupaten, maka pemerintah segera melibatkan banyak tokoh di dalam perumusan persiapan pemekaran, agar pemekaran segera dapat berjalan dengan baik. Selain pemerintah, tokoh politik seperti tokoh-tokoh partai politik juga ikut terlibat. Pada tahun 1999, partai yang berada di DPR-dan MPR sudah lebih dari tiga partai. Namun untuk di daerah, khususnya Kabupaten Bungo-Tebo, tiga partai besar seperti PDIP, Golkar dan PPP, masih menguasai politik di Bungo-Tebo. Tokoh-tokoh dari tiga partai politik ini ikut berperan di dalam pemekaran wilayah Bungo-Tebo, khususnya mereka yang duduk di kursi DPRD Tingkat II. Selain keterlibatan tokoh politik dan pemerintah, tokoh adat dan masyarakat juga ikut di dalam perumusan dan persiapan pemekaran wilayah. Beberapa tokoh adat dan masyarakat seperti ketua dan yang dituakan dilembaga adat dan masyarakat di Bungo-Tebo serta tokoh agama seperti ketua MUI juga ikut dilibatkan. Tidak hanya tokoh-tokoh pemerintahan yang masih aktif saja yang ikut berperan di dalam pemekaran Bungo-Tebo, mantan-mantan pejabat yang pernah memerintah dan menjabat di Bungo-Tebo juga ikut berperan, seperti mantan-mantan Bupati, dan pejabat lainnya.

Pihak-pihak yang terlibat di dalam pemekaran sebagian besar adalah mereka yang menjadi elit di masyarakat, baik itu sebagai elit pemerintahan di tingkat daerah hingga lokal, elit agama, adat, bahkan elit pemuda. Setiap elit yang terlibat tersebut memiliki peranan dan kepentingan masing-masing. Lebih terlihat lagi di dalam penjelasan tentang peranan elit pemerintahan baik di tingkat daerah maupun lokal. Elit pemerintahan di tingkat daerah memiliki peranan besar di dalam melobi bermacam-macam pihak agar usulan pemekaran diterima dan sesuai dengan persyaratan. Sedangkan untuk elit lokal seperti kepala desa, dibebani tanggung jawab oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemekaran, dan mengajak masyarakat untuk mendukung pemekaran. Dengan demikian, jika dukungan masyarakat dibutuhkan, terutama untuk penentuan batas wilayah dan penggunaan wilayah, pemerintah daerah akan lebih mudah mendapatkan bantuan dan dukungan tersebut.

Tabel 3. Tabel Gagasan yang di Usung Oleh Setiap Aktor di dalam Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo 2009

	Alasan bagi yang Ragu-ragu Terhadap Pemekaran			Alasan bagi yang Yakin Terhadap Pemekaran		
	Sosial	Ekonomi	Politik	Sosial	Ekonomi	Politik
Pemerintah/Pejabat	-	-	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tidak ingin membuang kesempatan dari pusat	
Elit politik				Memiliki peranan di masyarakat		Memperoleh kesempatan berkuasa di wilayah baru
Mantan pejabat	-	-	Takut dijadikan sebagai ajang cari kekuasaan	-	-	Memperoleh kesempatan berkuasa di wilayah baru
Tokoh adat/agama			Takut terjadi perebutan kekuasaan	Pembangunan yang merata	Meningkatkan perekonomian	Pemekaran 1999, merupakan kesempatan
LSM	Kondisi masyarakat yang belum siap	Pemanfaatan ekonomi oleh golongan tertentu	Terdapat perebutan kekuasaan/ada danya kepentingan politik	-	-	-
Tokoh Pemuda	Masyarakat tidak dilibatkan	Tidak ada perubahan kesempatan kerja	Adanya kepentingan politik dari golongan tertentu	-	-	-
Elit masyarakat lokal		Ketidakmerataan pembangunan	Persaingan mendapat kekuasaan	-	Meningkatkan perekonomian masyarakat	-
Masyarakat	Masyarakat tidak dilibatkan	Tetap Tidak mendapat akses ekonomi secara merata	Dimanfaatkan untuk mendapat kekuasaan	Pembangunan merata	Meningkatkan perekonomian	-

Sumber: Data primer (diolah) 2009

Manuver-manuver Aktor di dalam Mencapai Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo

Pemekaran wilayah dilatarbelakangi oleh banyak hal. Salah satu diantaranya adalah adanya rekayasa atau bentukan dari sekelompok orang atau elit tertentu, sehingga masyarakat dikondisikan membutuhkan pemekaran tersebut diwujudkan. Ketika

yang melatarbelakangi pemekaran adalah kondisi seperti itu, maka akan ada banyak pihak yang terlibat di dalam. Setiap pihak yang ikut bermain, mempunyai tujuan dan kepentingan masing-masing. Di dalam mewujudkan tiap-tiap kepentingan tersebut setiap aktor yang terlibat di dalam pemekaran memiliki manuver-manuver tersendiri. Keberhasilan masing-masing manuver dari tiap-tiap aktor yang terlibat tersebut tidak terlepas dari kekuasaan yang mereka miliki. Di dalam kasus pemekaran Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Pihak yang memiliki kekuasaan besar, seperti pemerintah serta elit birokrasi adalah mereka yang memiliki kekuasaan tersebut. Manuver-manuver tiap aktor di dalam pemekaran dapat dilihat dari tabel 4 berikut:

Dari tabel di atas bisa dilihat, jika peranan pemerintah sangat besar. Bisa disimpulkan bahwa gagasan dan ide pemekaran berasal dari pemerintah, baik pusat, provinsi atau pun daerah itu sendiri. Dari tabel di atas bisa dilihat, jika peranan pemerintah sangat besar. Bisa disimpulkan bahwa gagasan dan ide pemekaran berasal dari pemerintah, baik pusat, provinsi atau pun daerah itu sendiri. Pemerintah merupakan salah satu pihak yang ikut memiliki andil di dalam mewujudkan pemekaran. Pemerintah disini tidak hanya pemerintah sebagai suatu badan atau organisasi, tetapi individu-individu yang berada di dalam pemerintahan tersebut juga memiliki tujuan yang berbeda, dengan pemerintah ketika sebagai organisasi. Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu elit yang terlibat di dalam pencapaian suatu pemekaran wilayah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah bisa berupa rekayasa politik, penghegemonian terhadap kelompok lain, dan lainnya. Sebagai organisasi yang resmi, pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan resmi untuk mewujudkan terjadinya pemekaran. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai suatu organisasi inilah, yang terkadang dimanfaatkan oleh individu tertentu yang memiliki kedudukan di pemerintahan tersebut.

Untuk kasus pemekaran di Kabupaten Bungo-tebo, pemerintah berperan sebagai penguasa, penggagas, dan pelaksana dari pemekaran tersebut, baik pemerintah sebagai suatu organisasi, ataupun pemerintah yang digunakan oleh individu-individu yang berkuasa di dalamnya. Di Kabupaten Bungo-Tebo, setelah adanya pemberitahuan dari pihak pusat bahwa ada kesempatan bagi setiap wilayah untuk memekarkan daerahnya, pemerintah daerah Jambi dan pemerintah daerah tingkat dua Bungo-Tebo segera melakukan tindakan untuk mempersiapkan pemekaran tersebut. Jika dilihat berdasarkan fakta dilapangan, pada tahun 1999, sebenarnya banyak hal yang belum disiapkan oleh Kabupaten Bungo-Tebo untuk menjadi dua kabupaten. Namun pemerintah dengan kekuasaannya, berusaha untuk memenuhi hal tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Untuk mewujudkan pemekaran tersebut, semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu masyarakat sendiri, harus mempunyai suara yang sama dengan pemerintah, yaitu setuju akan pemekaran. Di dalam pencapaian kata setuju inilah, pemerintah melakukan tindakan yang disebut penghegemonian itu.

Tabel 4. Manuver-manuver masing-masing aktor di dalam pemekaran wilayah 2009

No	Tokoh/Aktor	Manuver
1	Pemerintah Provinsi	• Melobi Pusat
2	Pemerintah Daerah (elit birokrasi)	• Mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat baik ditingkat desa agar mensosialisasikan pemekaran ke masyarakat • Mengajak tokoh adat dan tokoh agama ikut ke dalam rapat dan pertemuan yang membahas pemekaran wilayah • Mengkoordinir semua dinas pemerintahan untuk mempersiapkan syarat-syarat pemekaran wilayah • Bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat (mantan pejabat) untuk mempersiapkan pemekaran • Pelobian ke pusat agar di dalam penilaian kelengkapan syarat pemekaran disetujui • Menggunakan tokoh masyarakat di desa untuk mendekati masyarakat agar menyetujui terjadinya pemekaran • Melobi Pusat, provinsi, dan masyarakat untuk menyetujui masalah batas wilayah
3	Elit Adat	• Mendukung dan menyetujui pemerintah untuk dilakukannya pemekaran (lebih sebagai alat bagi pemerintah agar pemekaran wilayah terwujud)
4	Elit Agama	• Sama dengan tokoh Adat
5	Elit Masyarakat di Pedesaan	• Sebagai alat bagi pemerintah untuk mensosialisasikan ke masyarakat luas tentang pemekaran • Mengajak masyarakat agar setuju membantu pemerintah mensukseskan pemekaran, seperti memberikan lahan untuk digunakan sebagai perkantoran ataupun jalan
6	Elit Masyarakat (mantan Pejabat pemerintahan)	• Ikut Melobi ke Pusat
7	Tokoh Politik (Tokoh Partai)	• Ikut Melobi ke Pusat
8	LSM	• Memantau manuver elit politik dan elit birokrasi di dalam melobi dan mempersiapkan pemekaran
9	Tokoh Pemuda	• Memantau manuver elit politik dan elit birokrasi di dalam mempersiapkan pemekaran • Mensosialisasikan pemekaran kepada masyarakat

Sumber: Data Primer (diolah) 2009

Pemerintah mengundang tokoh-tokoh masyarakat di dalam perumusan perencanaan pemekaran. Tokoh-tokoh masyarakat yang di undang di dalam perumusan ini, adalah mereka yang telah memiliki ide atau pun yang telah menerima ide dan gagasan dari pemerintah sebagai keinginan mereka sendiri. Bagi masyarakat secara umum, ketika pimpinan mereka (para tokoh masyarakat) telah setuju akan pemekaran tersebut, maka mereka secara otomatis menerima keputusan tersebut, walaupun pada kenyataannya mereka tidak dilibatkan di dalam pembentukannya. Hal ini karena masyarakat kebanyakan menganggap bahwa, apa yang telah diputuskan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat tersebut adalah keputusan bersama yang harus dilaksanakan. Untuk Kabupaten Bungo-Tebo sendiri,

pemerintah mengundang para tokoh masyarakat, seperti tokoh adat, para mantan pasirah, dan kepala-kepala desa, dengan tujuan agar mereka bisa mempengaruhi atau mengarahkan masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemekaran wilayah. Oleh karena keputusan dari tokoh masyarakat yang mereka junjung, maka masyarakat akan lebih mudah menerima keputusan tersebut. Rekayasa Elit Pemerintahan untuk Mempercepat Pemekaran Wilayah

Pemerintah merupakan salah satu elit yang mempunyai kemampuan untuk merekayasa suatu pemekaran. Pemerintah disini, tidak hanya pemerintah di dalam artian organisasi, tetapi juga pemerintah dari sudut pandang masing-masing individu yang ada di dalamnya. Untuk Kabupaten Bungo-Tebo sendiri, peranan pemerintah sangatlah besar. Pemekaran di kabupaten ini, secara garis besar merupakan suatu bentukan dari pemerintah. Hal ini karena, jika dilihat dari kondisi di lapangan Kabupaten Bungo-Tebo pada tahun 1999 belum layak untuk dimekarkan. Kepadatan penduduk yang masih rendah, pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang belum merata, jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan pra-sarana yang tidak memadai, pendapatan daerah yang belum cukup menunjukkan tanda-tanda bahwa kabupaten ini belum layak untuk dimekarkan. Namun ketika ada kesempatan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 1999 secara serentak seluruh Indonesia, menyebabkan pemerintah daerah memaksa Kabupaten Bungo-Tebo untuk dimekarkan. Sehingga banyak terjadi rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk kasus di Bungo-Tebo, elit yang banyak berperan di dalam merekayasa adalah pemerintah. Walaupun ada elit-elit lain yang ikut berperan, namun sebagian besar mereka adalah elit yang pro dengan pemerintah, atau elit yang mendapat dukungan dari pemerintah. Mereka adalah para tokoh masyarakat dan adat yang sebelumnya merupakan mantan pejabat di daerah Jambi ataupun mantan PNS disana. Sehingga apa yang menjadi kepentingan mereka tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kepentingan pemerintah.

Banyak faktor-faktor yang sebenarnya belum mampu dipenuhi oleh Kabupaten Bungo-tebo untuk menjadi kabupaten baru. Namun karena tidak ingin membuang kesempatan yang ada, banyak hal yang direkayasa seperti masalah perkantoran pemerintahan, yang nantinya berkaitan erat dengan masalah administrasi pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Tidak tersedianya sarana perkantoran membuat pemerintah kabupaten melakukan rekayasa, dengan menjadikan beberapa kantor yang ada menjadi kantor sementara pemerintah. ketergesa-gesaan dan singkatnya waktu juga memaksa pemerintah untuk segera menentukan lokasi pemerintahan dan ibukota dari kabupaten yang baru. Hal ini menjadi masalah, karena keputusan pemerintahan di dalam menentukan lokasi tersebut kurang tepat, karena tidak berada di tengah-tengah, dan tidak semua wilayah mudah menjangkaunya. Hal ini dikemudian hari memberikan permasalahan baru, dimana terjadi ketidakmerataan pembangunan di Kabupaten Tebo.

Selain permasalahan perkantoran, rekayasa lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah masalah batas wilayah. Karena penetapan batas yang tergesa-gesa, masalah pemekaran wilayah ini masih menyisakan suatu konflik terpendam hingga sekarang. Di awal perencanaan pemekaran, batas wilayah merupakan permasalahan yang tertinggal. Ketika itu, batas wilayah belum ditetapkan secara rinci, sedangkan batas wilayah merupakan salah satu syarat kelengkapan dari pusat. Karena desakan waktu,

ketika itu ditentukanlah batas wilayah sementara, yang tidak berdasarkan kewedanaan yang telah ada, dan akan diubah kembali setelah pemekaran wilayah diresmikan. Namun pada kenyataannya, hingga sekarang masalah tersebut belum tuntas diselesaikan. Kembali lagi, ketergesa-gesaan pemerintah di dalam mempersiapkan pemekaran wilayah menyisakan masalah di dalam perkembangan selama sepuluh tahun kabupaten ini dimekarkan. Ketidakjelasan di dalam penetapan batas wilayah menciptakan konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan hingga sekarang.

KESIMPULAN

Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana birokrasi yang ada menjadi lebih pendek dan sederhana, dan semua sumber daya lokal dapat dinikmati dan dikelola langsung bagi dan oleh masyarakatnya, dan pengawasan terhadap masyarakatnya juga menjadi lebih mudah. Namun fakta di lapangan tujuan pemekaran seperti ini sangat jarang ditemukan. Ketidaksiapan pemerintah di dalam pemekaran wilayah, tidak hanya membawa dampak sesaat. Tetapi juga dirasakan oleh masyarakat hingga sekarang. Keputusan tergesa-gesa di awal pemekaran, menyebabkan kebijakan pembangunan di kabupaten baru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, terjadi pembangunan yang tidak merata, dan masyarakat tidak merasa puas akan pemekaran yang ada. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pemekaran wilayah di Kabupaten Bungo-Tebo, terutama Kabupaten Tebo bisa dikatakan belum berhasil.

Kegagalan pemerintah di dalam melaksanakan pemekaran selama sepuluh tahun, disebabkan karena latar belakang pemekaran yang sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pribadi dari pihak-pihak (terutama elit birokrasi dan elit politik berkuasa) yang terlibat di dalam proses pemekaran. Jika melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Bungo-Tebo, bisa disimpulkan bahwa pemekaran wilayah belum layak dilakukan pada tahun 1999. Oleh karena itu, pemekaran di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, dapat dikatakan bukanlah untuk kepentingan masyarakat, tetapi lebih sebagai pertarungan untuk memperoleh kekuasaan di antara aktor yang terlibat.

Jika melihat penjelasan analisa sebelumnya, kebijakan pemekaran tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan tidak membawaa kesejahteraan bagi masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut gagal, dan sebaiknya dihentikan. Bahkan jika dikaji lebih lanjut untuk ke depannya, penyatuan kembali kedua kabupaten ini, merupakan saran yang patut dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agusniar, A. 2006. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah Dan Kesejahteraan Masyarakat, Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Naggroe Aceh Darusalam. Master Thesis. Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan, Program Pascasarjana IPB: Bogor.

Anonymous , 1999. *Pemekaran Irja*. www.mediaindo.co.id.

_____, 1999. *Bungo Dalam Angka*. Badan Statistik Provinsi Jambi

_____, 1999. *Tebo Dalam Angka*. Badan Statistik Provinsi Jambi

- _____, 2006. *Bungo Dalam Angka*. Badan Statistik Provinsi Jambi
- _____, 2006. *Tebo Dalam Angka*. Badan Statistik Provinsi Jambi
- _____, 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Pemerintah*. 2000. Diunduh dari www.indonesia-ottawa.org/page.php?s=2011PP129_2000&type
- Babbie, E. 2004. *The Practice of Social Research 10th*. Wadsworth, Thomas Learning: USA
- Escobar A, 1990. *After Nature: Step to an Antiessentialist Political Ecology*. University Of Chicago Press: JSTOR.
- _____, 1998. *Whose Knowledge, Whose nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movements*. Journal of Political Ecology. Volume 5.
- Evers, H. D and Schiel T. 1990. *Kelompok-Kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*. Yayasan Obor Indonesia. (Hlm. 30-74): Jakarta.
- Foucault M. 2002. *Arkeologi Pengetahuan*. Penerbit Qalam: Yogyakarta
- Gutting, G, 2006. *The Cambridge Companion To Foucault*. Cambridge University Press: New York
- Hermawati, R. 2007. *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah: Analisis Kasus Provinsi Sumatra Selatan*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Manajemen, IPB: Bogor.
- Johnson, Richard, 2007. *Post-Hegemony? I Don't Think So*. Sage Publication
- Korten, D.C dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Lash, Scott, 2007. *Power After Hegemony: Cultural Studies in Mutation*. SAGE Publication.
- Lauer, R.H. 2003. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Lumbessy, K. 2005. *Analisis dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Buru*. Tesis. Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan, Program Pascasarjana IPB: Bogor.
- Mills, C, Wright, 1956. *The Power Elite*. Colombia University
- Sugiono, M, 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Sztompka, P. 1994. *The Sociology of Social Change*. Oxford: Blackwell Publishers
- Thoburn, Nicholas, 2007. *Pattern of Production: Culture Studies After Hegemony*. SAGE Publication.

Turner, S B, 1999. *Classical Sociology*. SAGE Publication: London.